



RENCANA KERJA TAHUN 2022



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR

Jl. Ahmad Adnawijaya No.45 A Kota Bogor

Email : disdukcapilkotabogor@yahoo.co.id



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2022 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2009 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan Renja Perangkat Daerah merupakan:
 - a. dokumen perencanaan kerja Perangkat Daerah untuk periode tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 - b. penjabaran dari RKPD Kota Bogor tahun 2022 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yang terukur pada setiap rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (3) Tujuan penetapan Renja Perangkat Daerah adalah untuk:
 - a. mewujudkan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah yang mendukung visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2022

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB IV PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah dapat diubah dalam hal terjadi perubahan RKPD Kota Bogor yang dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana kerja perangkat daerah;
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah;
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD dan renja perangkat daerah tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, terdiri dari Renja:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
- o. Dinas Tenaga Kerja;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- t. Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Dinas Perumahan dan Permukiman;
- v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Pendapatan Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Kecamatan Bogor Tengah;
- dd. Kecamatan Bogor Selatan;
- ee. Kecamatan Bogor Barat;
- ff. Kecamatan Bogor Utara;
- gg. Kecamatan Bogor Timur;
- hh. Kecamatan Tanah Sareal; dan
- ff. Unit Organisasi yang Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Juli 2021

WALI KOTA BOGOR,


BIMA ARYA


Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,


SYARIFAH SOFIAH D


BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 86

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 86 Tahun 2021

TANGGAL : 19 Juli 2021

TENTANG : RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR TAHUN 2022

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat Kota Bogor demi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Reformasi Birokrasi di Kota Bogor.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsinya Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Peraturan Daerah Kota Bogor. Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019 - 2024, bahwa dalam hal belum tersusunnya RPJMD Tahun 2019 - 2024, RKPD Tahun 2021 dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan tahapan ketiga Pembangunan Jangka Menengah (2019 – 2024) RPJPD Tahun 2005 - 2025.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E, Tambahan Lembar Daerah Nomor 45);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 52 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Bahwa Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor merupakan arah dan pedoman bagi Sekretariat dan Bidang di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam melaksanakan rencana kegiatan tahunan dalam jangka 1 (satu) tahun.

b. Tujuan

- Mensinergikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
- Adanya kesinambungan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 2021 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Alokasi dana anggaran untuk kegiatan program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sesuai dengan DPA yang bersumber dari APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34.350.000
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.273.400
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.809.981.472
4.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	58.325.000
5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.248.000
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.855.418.000
7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.562.400
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	607.970.800
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	213.000.000
10.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	107.700.000
11.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	546.172.000
12.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	1.134.042.880
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	446.400.000
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.373.810.336
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.881.000
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	238.190.970
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	247.432.000
18.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	37.151.000
19.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk	35.000.000
20.	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	700.000.000

21.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting	13.550.000
22.	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	36.366.000
23.	Pengumpulan, Analis dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	64.106.000
24.	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, formulir dan buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	300.000.000
25.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	35.000.000
26.	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	126.057.000
27.	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	150.600.000
Jumlah		17.571.588.258

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai Dengan **Triwulan III** Tahun Anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor meliputi :

1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD : Rp. 34.350.000
Realisasi anggaran : Rp. -
Kinerja anggaran : 0 %
Rencana/realisasi output : -
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Rp. 108.273.400
Realisasi anggaran : Rp. 12.350.000
Kinerja anggaran : 11,40 %
Rencana/realisasi output : Tersusunnya dokumen Renja, LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Tahunan
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan : Rp. 58.325.000
Realisasi anggaran : Rp. 15.200.000
Kinerja anggaran : 26,06 %
Rencana/realisasi output : Terlaksananya sosialisasi dan implementasi peraturan perundang-undangan
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : Rp. 19.248.000
Realisasi anggaran : Rp. 13.734.900.
Kinerja anggaran : 71,35 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga (penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor)
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Rp. 1.855.418.000
Realisasi anggaran : Rp. 564.250.600
Kinerja anggaran : 30,41 %
Rencana/realisasi output : Pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah (printer, ribbon, dll)
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga kantor

6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : Rp. 73.562.400
Realisasi anggaran : : Rp. 50.602.100
Kinerja anggaran : 68,78 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga kantor (fasilitasi kebersihan dan keamanan kantor)
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Rp. 607.970.800
Realisasi anggaran : Rp. 515.417.100
Kinerja anggaran : 68,78 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perkantoran (belanja ATK)
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Rp. 213.000.000
Realisasi anggaran : Rp. 203.465.150
Kinerja anggaran : 95,52 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perkantoran (belanja cetak, penggandaan dan penjiilidan)
9. Fasilitas Kunjungan Tamu : Rp. 107.700.000
Realisasi anggaran : Rp. 23.695.000
Kinerja anggaran : 22 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perkantoran (pemenuhan jamuan makan tamu)
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Rp. 546.172.000
Realisasi anggaran : Rp. 148.193.444
Kinerja anggaran : 27,13 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perkantoran (rapat konsultasi dan koordinasi SKPD)
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya : Rp. 1.134.042.880
Realisasi anggaran : Rp. 208.452.000
Kinerja anggaran : 18,38 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perkantoran (belanja pengadaan mesin anjungan kependudukan, pengadaan komputer, alat perekaman dan mesin penunjang lainnya)
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Rp. 446.400.000
Realisasi anggaran : Rp. 131.156.193
Kinerja anggaran : 29,38 %
Rencana/realisasi output : terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perkantoran (belanja listrik, telepon, air dan surat kabar)

13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Rp. 1.373.810.336
Realisasi anggaran : Rp. 875.880.898
Kinerja anggaran : 29,38 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perkantoran (belanja jasa keamanan, kebersihan, supir dan pakaian dinas)
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : Rp. 199.881.000
Realisasi anggaran : Rp. 80.736.496
Kinerja anggaran : 40,39 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perkantoran (belanja pajak kendaraan, bahan bakar/pelumas dan belanja pemeliharaan kendaraan dinas)
15. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya : Rp. 238.190.970
Realisasi anggaran : Rp. 33.990.000
Kinerja anggaran : 14,27 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga perkantoran (belanja jasa perencanaa, pengawasan dan pemeliharaan gedung kantor)
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya : Rp. 247.432.000
Realisasi anggaran : Rp. 199.932.000
Kinerja anggaran : 80,80 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga perkantoran (pemeliharaan genset, server dan sarana kantor lainnya)
17. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk : Rp. 37.151.000
Realisasi anggaran : Rp. 24.450.000
Kinerja anggaran : 65,81 %
Rencana/realisasi output : Tertatanya administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib memiliki KTP
18. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk : Rp. 35.000.000
Realisasi anggaran : Rp. -
Kinerja anggaran : 0 %
Rencana/realisasi output : -
19. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan : Rp. 700.000.000
Realisasi anggaran : Rp. 121.500.000
Kinerja anggaran : 17,35 %
Rencana/realisasi output : Tersedianya balnko dan formulir pencatatan sipil

20. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting :
Rp. 13.550.000
Realisasi anggaran : Rp. 13.550.000
Kinerja anggaran : 100 %
Rencana/realisasi output : Tersedianya pencatatan perkawinan bagi pasangan yang belum tercatat perkawinannya (pasangan non muslim) dan terlaksananya penataan dokumen administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian
21. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil : Rp. 36.366.000
Realisasi anggaran : Rp. 36.366.000
Kinerja anggaran : 100 %
Rencana/realisasi output : Tersedianya buku register akta pencatatan sipil
22. Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil : Rp. 64.106.000
Realisasi anggaran : Rp. 63.146.900
Kinerja anggaran : 98,50 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya pelayanan kepemilikan akta
23. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, formulir dan buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan : Rp. 300.000.000
Realisasi anggaran : Rp. 297.205.950
Kinerja anggaran : 99,06 %
Rencana/realisasi output : Terpenuhinya dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil
24. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan : Rp. 35.000.000
Realisasi anggaran : Rp. 35.000.000
Kinerja anggaran : 100 %
Rencana/realisasi output : Tersedianya buku agregat dan buku profil kependudukan
25. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan : Rp. 126.057.000
Realisasi anggaran : Rp. 124.779.500
Kinerja anggaran : 98,98 %
Rencana/realisasi output : Tersedianya media informasi publik (cetak)
26. Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah : Rp. 150.600.000
Realisasi anggaran : Rp. 100.277.198
Kinerja anggaran : 66,58 %
Rencana/realisasi output : Terlaksananya digitalisasi arsip kependudukan dan pencatatan sipil

Adapun Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor seperti dibawah ini :

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
2.	Rasio Bayi berakte Kelahiran	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
4.	Ketersediaan database Penduduk skala Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	75	98	90	95	95	95	95
7.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	75	95	82	85	95	95	95
8.	Kepemilikan KTP	93,30	99,50	99,80	100	100	100	100
9.	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Usia 0-18 Tahun	94,07	95	96	97	98	100	100
10.	Cakupan Pasangan Non Muslim Berakte Kawin	3,80	25	30	35	40	45	45

TABEL T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Disdukcapi Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun (n-1) 2021	Perkiraan Realisasi Capaian	
				Target Renja Disdukcapi Tahun (n-2) 2020	Realisasi Renja Disdukcapi Tahun (n-2) 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	(10) = (5+7+9)*	11 = (10/4)*
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	SOP	60 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	20 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan SKPD : Renja, Renstra, DPA, DPPD, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, LKPJ, LPPD, SOP, Buku Survei IKM	24 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100 %	12 dokumen	36 dokumen	150 %
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi dan implementasi peraturan perundang-undangan	60 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	20 %
Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah ketersediaan peralatan listrik	20 jenis	8 jenis	4 jenis	5 jenis	100 %	5 jenis	18 jenis	90 %

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan operasional perangkat daerah	60 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	20 %
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan bahan pakai habis rumah tangga dan peralatan taman	30 jenis	12 jenis	6 jenis	6 jenis	100 %	6 jenis	24 jenis	73,33 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor	30 jenis	10 jenis	5 jenis	5 jenis	100 %	5 jenis	20 jenis	66,66 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan operasional perangkat daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Luar Daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan barang (peralatan dan mesin)	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	20 rekening	4 rekening	4 rekening	4 rekening	100 %	4 rekening	12 rekening	60 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga informasi, keamanan, keberihan, supir yang dibayarkan, pakaian dinas, pakaian kerja, belanja premi BPJS kesehatan dan belanja sepatu	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah penyediaan bahan bakar, pelumas, dan pemeliharaan pajak kendaraan, alat angkut,	125 motor 30 mobil	50 motor 12 mobil	25 motor 6 mobil	25 motor 6 mobil	100 %	25 motor 6 mobil	100 motor 24 mobil	80 % 80 %

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan bermotordan penumpang								
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dan DED pembangunan kantor	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ rehabilitasi rutin/ berkala sarana dan prasarana kantor (genset, kendaraan dinas, sarana kantor dan server)	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (Kepemilikan KTP)	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan Pendaftaran Penduduk (pindah datang), WNI, WNA dan RW percontohan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen/blanko kependudukan yang tersedia	60 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	20 %
PROGRAM PENCATATAN SIPIL									
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya sosialisasi workshop perkawinan dan perceraian	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %

Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya sosialisasi dan workshop pelayanan pencatatan sipil, dan tersedianya penjilidan buku register akta	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Pengumpulan, Analisis, Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan kepemilikan akta	60 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	20 %
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil	60 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	20 %
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Tersusunnya data buku agregat kependudukan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase ketersediaan media informasi publik (cetak)	60 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	20 %
Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi adminduk tingkat kecamatan dan kelurahan	2 aplikasi	-	2 aplikasi	2 aplikasi	100 %	12 bulan	2 aplikasi	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1. Prosentase penduduk yang memiliki KK
2. Prosentase penduduk yang memiliki KTP-el
3. Prosentase anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Untuk mencapai target prosentase kepemilikan Kartu Keluarga dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan, Pemeliharaan jaringan online dan hardware, Peningkatan SDM Operator, Pembangunan Aplikasi Pelayanan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Penataan dokumen kependudukan, Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan, dan Intensifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Target Prosentase penduduk yang memiliki Akte Kelahiran dicapai dengan kegiatan.

Pelayanan Pencatatan Sipil, Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil, Peningkatan SDM Operator, Pembangunan aplikasi pelayanan, Pemeliharaan Jaringan online dan hardware, Pengadaan sarana penyimpanan dokumen kependudukan, Penataan dokumen kependudukan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan dan Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Target prosentase penduduk yang memiliki KTP akan dicapai dengan kegiatan Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el), Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan, Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, Pemeliharaan jaringan online dan hardware, Penataan dokumen kependudukan, Pembangunan aplikasi pelayanan, Peningkatan SDM operator, Pengadaan sarana penyimpan dokumen kependudukan, dan Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan.

Tingkat keakuratan pencatatan peristiwa kependudukan akan dicapai dengan kegiatan Pelayanan surat pindah datang, Pelayanan Kartu Keluarga, Pengelolaan informasi kependudukan, Intensifikasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, dan Pemeliharaan jaringan online dan hardware.

Untuk mencapai tingkat updating database kependudukan dilaksanakan dengan kegiatan Pemeliharaan jaringan online dan perangkat keras/hardware, Pengadaan peralatan pendukung SIAK, Peningkatan SDM operator SIAK, dan Pengelolaan Informasi kependudukan guna

meningkatkan kesadaran tertib administrasi dilakukan langkah-langkah kerjasama antar SKPD dan membuat dan meningkatkan inovasi, sosialisasi yang dilakukan melalui pembuatan company profil disdukcapil agar masyarakat lebih memahami kinerja disdukcapil dan pembuatan animasi pelayanan merupakan inovasi sosialisasi dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan layanan-layanan tersebut, Disdukcapil Kota Bogor didukung oleh sarana/prasarana yang cukup memadai seperti mesin anjungan nomor antrian, pojok baca, tempat duduk lansia, parkir kendaraan kaum difabel, kursi roda bagi kaum difabel, dan sarana-sarana penunjang lainnya yaitu pojok ASI, penyediaan air siap minum (dari PDAM), parkir kendaraan, arena bermain anak dan musholla.

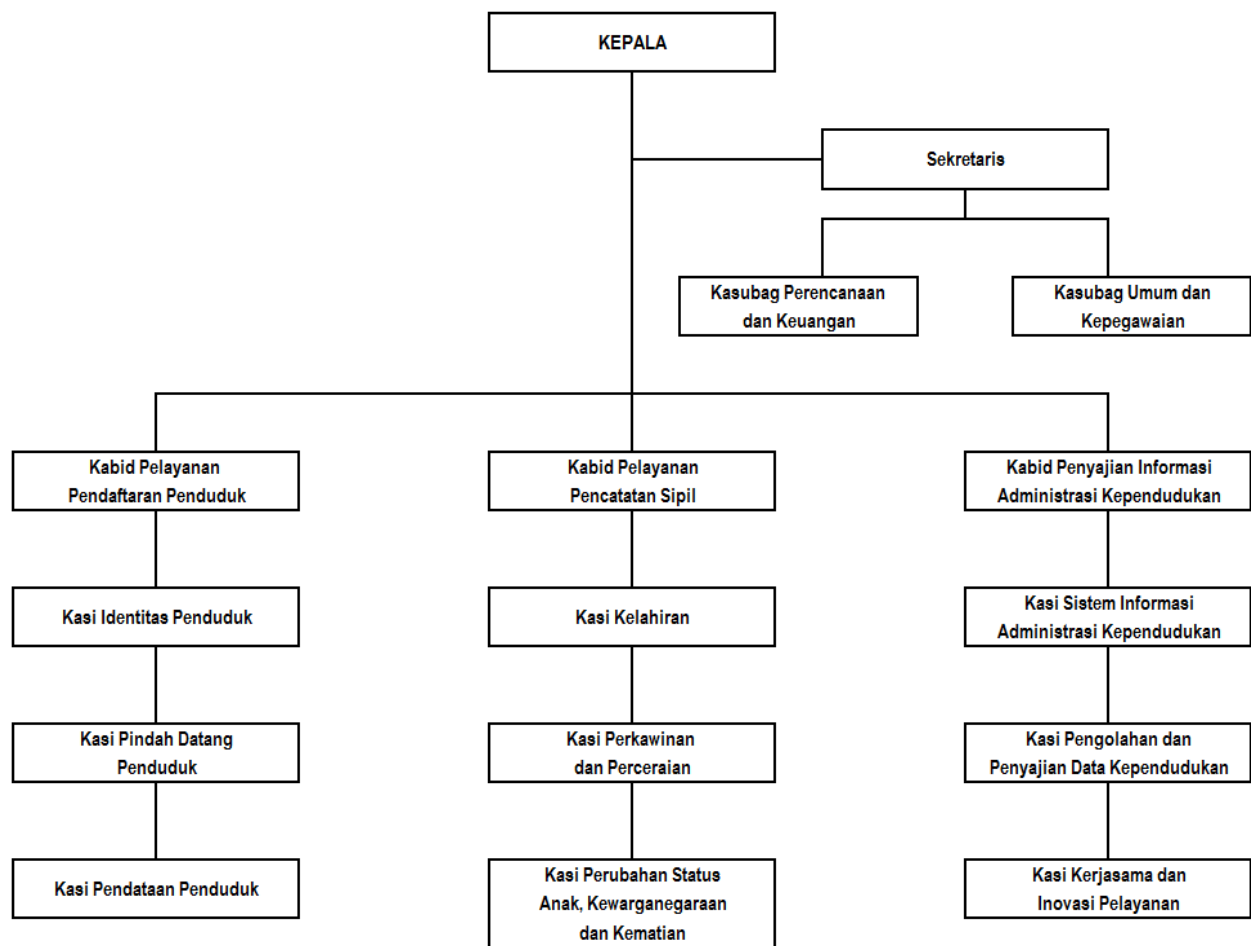
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam melaksanakan program dan kegiatan di dukung 54 pegawai dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Tabel 2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Status/Golongan

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	PNS-Golongan IV	6 Orang
2.	PNS-Golongan III	25 Orang
3.	PNS-Golongan II	22 Orang
4.	PNS-Golongan I	1 Orang
Jumlah		54 Orang

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor



Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (2018)	Tahun (2019)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	Tahun (2018)	Tahun (2019)	Tahun (2020)	Tahun (2021)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Penduduk yang ber-KTP/ Jumlah Penduduk Wajib KTP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,08%	99%	100%	100%	Adanya Peningkatan kesadaran penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan (KTP)
2.	Presentase Penduduk yang memiliki akte kelahiran/jumlah penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,84%	94%	100%	100%	Adanya Peningkatan kesadaran penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen Administrasi Kependudukan (Akte)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Isu-isu penting yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk saat ini :

1. Belum optimalnya cakupan penduduk yang memiliki KTP Elektronik (KTP-el), akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan identitas kependudukan;
2. Banyaknya anak yang belum mempunyai Akta Kelahiran, akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan identitas kependudukan;
3. Belum terdatanya anak usia 0 – 16 + (tidak ber-KTP), sehingga perlu diantisipasi dengan pembuatan Kartu Identitas Anak;

2.4 Riview terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2022 dengan Program dan Kegiatan 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Riview terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Tersedianya Buku Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah Sertifikat Hasil Audit ISO Tersusunnya Laporan LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Renstra dan Renja Tersusunnya RKA dan DPA	10 buku 1 sertifikat 20 buku 10 buku 10 buku	111.423.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Tersusunnya Buku Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah Sertifikat Hasil Audit ISO Tersusunnya Laporan LKIP, LKPJ, LPPD dan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan Renstra dan Renja Tersusunnya RKA dan DPA	10 buku 1 sertifikat 20 buku 10 buku 10 buku	111.423.400
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Bogor	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	11.930.261.082	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kota Bogor	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	11.365.772.234
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan komponen listrik	1 Tahun	22.135.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Tersedianya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	22.135.100
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	84.596.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun	84.596.600
5.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	1 Tahun	699.166.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun	620.872.700
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	244.950.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Tersedianya amplop dinas, blanko dinas dan buku disposisi	1 Tahun	244.950.000
7.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	1 Tahun	123.855.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bogor	Terfasilitasinya kunjungan tamu	1 Tahun	123.855.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	1 Tahun	885.900.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Tersedianya penyelenggaraan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1 Tahun	532.840.400
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bogor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 %	4.032.803.264	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bogor	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor	100 %	1.777.475.224
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listik	Kota Bogor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	1 Tahun	513.360.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listik	Kota Bogor	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	1 Tahun	513.360.000
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Tersedianya Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi, jasa tenaga keamanan , tenaga kebersihan, tenaga supir, belanja pakaian dinas, premi BPJS dan sepatu PDH	100 %	2467894.488	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Tersedianya jasa urusan pemerintahan untuk menunjang kalancaran kegiatan dimas	100 %	1.767.683.848
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	1 Tahun	114.137.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur kantor	1 Tahun	114.137.400
13.	Pemeliharaaa/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Bogor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	1 Tahun	651.474.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Bogor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	651.474.000
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Bogor	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	1 Tahun	284.546.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Bogor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	1 Tahun	284.546.800
15.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Persentase pendataan penduduk non permanen dan rentan	100 %	183.010.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Terlaksananya workshop pendataan penduduk non permanen dan rentan	1 bulan	66.150.000
16.	Pencatatan, Penatausahaan dan	Kota Bogor	Presentasi penduduk wajib KTP yang memiliki KTP	99,50 %	43.781.600	Pencatatan, Penatausahaan dan	Kota Bogor	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	75 %	43.781.600

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Presentasi penduduk wajib KTP yang memiliki KK Presentasi penduduk yang memiliki KIA	100 % 40 %		Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk		Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	12 bulan	
17.	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Persentase penduduk pindah datang WNI Persentase penduduk pindah datang WNA	99 % 50 %	71.649.600	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	12 bulan	27.200.000
18.	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Tersedianya pengadaan alat tulis kantor khusus pencetakan e-KTP dan KIA	90 %	2.576.769.000	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	12 bulan	850.852.000
19.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Bogor	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan dan perceraian	96 %	197.273.200	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Bogor	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil di bidang perkawinan dan perceraian	12 bulan	47.661.600
20.	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	96 %	177.539.200	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil di bidang akta kelahiran	12 bulan	97.890.000
21.	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Persentase penduduk yang memiliki akta pencatatan sipil	96 %	364.106.000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil dan tersedianya pengadaan dokumen pencatatan sipil	12 bulan	230.402.000
22.	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Kota Bogor	Adanya arsip digital yang terintegrasi dalam satu data arsip kependudukan dan pencatatan sipil	40 %	175.000.000	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Kota Bogor	Tersedianya aplikasi yang dapat memudahkan dalam pengarsipan	100 %	175.000.000
23.	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Jumlah Aplikasi Adminduk Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2 Aplikasi	345.000.000	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Jumlah Aplikasi Adminduk Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2 Aplikasi	345.000.000
24.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Persentase pemenuhan kebutuhan informasi administrasi kependudukan	100 %	233.294.800	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Tersedianya sarana dan prasarana informasi administrasi kependudukan	1 Tahun	100.864.800
25.	Penyajian Data	Kota	Tersusunnya data buku	100 %	63.000.000	Tersusunnya data buku	Kota Bogor	Terlaksananya penyusunan	100 %	21.880.000

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Kependudukan Yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Bogor	agregat kependudukan			agregat kependudukan		Data Agregat Kependudukan		
26.	Penyediaan data kependudukan Kabupaten/kota	Kota Bogor	Jumlah data kependudukan yang terintegrasi dala satu data pembangunan daerah	100 %	85.000.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan yang prima	100 %	33.600.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2020-2024 dan tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat.

Tabel T–C.32
Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota Bogor

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

3.5 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

- a. Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dengan standart pelayanan minimal (SPM)
- b. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan
- c. Peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan aplikasi layanan kependudukan
- d. Memperkuat jaringan SIAK dengan strategi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan secara terpadu
- e. Pengintegrasian program Kependudukan Nasional disesuaikan dengan kondisi daerah.

3.6 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor disesuaikan dengan arah dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 yang merupakan bagian dari akhir tahapan pembangunan jangka menengah ketiga (2019-2024).

Arah pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2022, berkenaan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

- a. Peningkatan Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang handal, akuntabel dan mudah diakses dalam mendukung perencanaan Pembangunan
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan data antar SKPD
- c. Pengembangan sistem pengolahan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal
- d. Penguatan kelembagaan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan Kota Bogor tahun 2019 - 2024 yaitu ” Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Kondusifitas Daerah Serta Pengelolaan Rencana ”.

Dari prioritas pembangunan tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagai berikut :

✓ Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

✓ Sasaran 1 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas

✓ Sasaran 2 :

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan

Tabel 4
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

No.	Tahun 2022					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Tersedianya laporan SKPD : Renja, Renstra, DPA, DPPD, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, LKPJ, LPPD, SOP, Buku Survei IKM	1 kegiatan, 20 buku	111.423.400	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Tersedianya laporan SKPD : Renja, Renstra, DPA, DPPD, RKA, LAKIP, Laporan Tahunan, LKPJ, LPPD, SOP, Buku Survei IKM	1 kegiatan, 20 buku	125.000.000	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan PNS	1 Tahun	11.365.772.234	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan PNS	1 Tahun	11.930.000.000	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Tersedianya peralatan listrik	1 Tahun	22.135.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bogor	Pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD (tersedianya peralatan listrik)	1 Tahun	25.000.000	
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Tersedianya isi galon, masker, pengisian tabung gas, peralatan dan	1 Tahun	84.596.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Tersedianya isi galon, masker, pengisian tabung gas, peralatan dan	1 Tahun	90.000.000	

			bahan pakai habis rumah tangga dan peralatan taman					bahan pakai habis rumah tangga dan peralatan taman			
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	620.872.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	750.000.000	
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Tersedianya amplop dinas, blanko dinas, buku disposisi dan dus arsip	1 Tahun	244.950.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bogor	Tersedianya amplop dinas, blanko dinas, buku disposisi dan dus arsip	1 Tahun	260.000.000	
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bogor	Pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	123.855.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bogor	Pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100 %	123.855.000	
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	532.840.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 Tahun	950.000.000	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bogor	Hardisk eksternal Hardisk server HP Hardisk server utk Dukcapil Komputer PC Microsoft windows Server 2019 Pintu pingger point Printer e-KTP Printer avansia Printer primacy Server database Switchhub 24 port	12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 6 unit 3 unit 16 unit 15 unit 15 unit 5 unit 12 unit	1.777.475.224	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Bogor	Hardisk eksternal Hardisk server HP Hardisk server utk Dukcapil Komputer PC Microsoft windows Server 2019 Pintu pingger point Printer e-KTP Printer avansia Printer primacy Server database Switchhub 24 port	12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 6 unit 3 unit 16 unit 15 unit 15 unit 5 unit 12 unit	2.500.000.000	

5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Belanja air, belanja kawat/fax/internet dan pos, belanja listrik, belanja surat kabar/majalah dan belanja telepon	1 Tahun	513.360.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Belanja air, belanja kawat/fax/internet dan pos, belanja listrik, belanja surat kabar/majalah dan belanja telepon	1 Tahun	513.360.000	
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Belanja jasa tenaga informasi, keamanan, keberihan, supir, pakaian dinas, pakaian kerja, belanja premi BPJS kesehatan dan belanja sepatu	1 Tahun	1.767.683.848	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Belanja jasa tenaga informasi, keamanan, keberihan, supir, pakaian dinas, pakaian kerja, belanja premi BPJS kesehatan dan belanja sepatu	1 Tahun	2.500.000.000	
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Belanja bahan bakar dan pelumas, pajak kendaraan, pemeliharaan alat angkut, kendaraan bermotordan pemumpang	1 Tahun	114.137.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Belanja bahan bakar dan pelumas, pajak kendaraan, pemeliharaan alat angkut, kendaraan bermotordan pemumpang	1 Tahun	114.137.500	

6.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Bogor	Belanja konsultasi pengawasan, konsultasi perencanaan, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dan DED pembangunan kantor	1 Tahun	651.474.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Kota Bogor	Belanja konsultasi pengawasan, konsultasi perencanaan, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dan DED pembangunan kantor	1 Tahun	4.500.000.000	
6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Bogor	Pemeliharaan/ rehabilitasi rutin/ berkala sarana dan prasarana kantor (genset, kendaraan dinas, sarana kantor dan server)	1 Tahun	284.546.800	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota Bogor	Pemeliharaan/ rehabilitasi rutin/ berkala sarana dan prasarana kantor (genset, kendaraan dinas, sarana kantor dan server)	1 Tahun	295.000.000	
II.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK										
7.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk										
7.1	Pendataan Pendudukm Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Pemutakhiran data penduduk	1 Tahun	66.150.000	Pendataan Pendudukm Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Bogor	Pemutakhiran data penduduk	1 Tahun	250.000.000	
7.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan (Kepemilikan KTP)	1 Tahun	43.781.600	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kependudukan (Kepemilikan KTP)	1 Tahun	55.391.000	
7.3	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran	1 Tahun	27.200.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Terlaksananya Pelayanan Pendaftaran	1 Tahun	65.930.000	

			Penduduk (pindah datang), WNI, WNA dan RW percontohan					Penduduk (pindah datang), WNI, WNA dan RW percontohan			
8.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk										
8.1	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kota Bogor	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Cleanning card Avansia Cleanning kit Printer e-KTP Full color ribbon Resin black Seal paner HDP film Ribbon color Avansia Ribbon film evolis Avansia	50 roll 91 roll 402 roll 100 roll 150 roll 150 roll	850.852.000	Pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP-el, formulir dan buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Kota Bogor	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan Cleanning card Avansia Cleanning kit Printer e-KTP Full color ribbon Resin black Seal paner HDP film Ribbon color Avansia Ribbon film evolis Avansia	50 roll 91 roll 402 roll 100 roll 150 roll 150 roll	1.500.000.000	
III.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL										
9.	Pelayanan Pencatatan Sipil										
9.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Bogor	Terlaksananya sosialisasi workshop perkawinan dan perceraian	120 orang	47.661.600	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Bogor	Terlaksananya sosialisasi workshop perkawinan dan perceraian	120 orang	197.273.300	
9.2	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Terlaksananya sosialisasi dan workshop pelayanan	100 orang 1.000 buku	97.890.000	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Terlaksananya sosialisasi dan workshop pelayanan	100 orang 1.000 buku	185.000.000	

			pencatatan sipil, dan tersedianya penjilidan buku register akta					pencatatan sipil, dan tersedianya penjilidan buku register akta			
10.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										
10.1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Tersedianya blanko KIA Cetak formulir pencatatan sipil Cetak map akte kelahiran Cetak map akte kematian Cetak akte kutipan kedua Cetak map akte perceraian Cetak map akte perkawinan	15.000 buah 1 Tahun 1.000 buah 1.000 buah 1.000 buah 1.000 buah 1.000 buah	230.402.000	Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Kota Bogor	Tersedianya blanko KIA Cetak formulir pencatatan sipil Cetak map akte kelahiran Cetak map akte kematian Cetak akte kutipan kedua Cetak map akte perceraian Cetak map akte perkawinan	15.000 buah 1 Tahun 1.000 buah 1.000 buah 1.000 buah 1.000 buah 1.000 buah	475.106.000	
IV.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
10.	Pengumpulan Data Kependudukan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan										
10.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Bogor	Tersusunnya data buku agregat kependudukan	100 buku	21.880.000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kota Bogor	Tersusunnya data buku agregat kependudukan	100 buku	50.000.000	
10.2	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Jumlah aplikasi adminduk tingkat kecamatan dans kelurahan	2 aplikasi	345.000.000	Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kota Bogor	Jumlah aplikasi adminduk tingkat kecamatan dans kelurahan	2 aplikasi	380.000.000	
11.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
11.1	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Kota Bogor	Tersedianya brosur, media cetak lokal, poster dn xbanner	1 Tahun	100.864.800	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Kota Bogor	Tersedianya brosur, media cetak lokal, poster dn xbanner	1 Tahun	250.000.000	

	Kependudukan					Kependudukan					
11.2	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Kota Bogor	Tersedianya arsip digital	1 Tahun	175.000.000	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Kota Bogor	Tersedianya arsip digital	1 Tahun	200.000.000	
12.	Pembinaan dan Pengawasan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
12.1	Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Bogor	Terlaksananya pelatihan peningkatan wawasan operator wilayah	1 Tahun		Bimbingan Teknis terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Bogor	Terlaksananya pelatihan peningkatan wawasan operator wilayah	1 Tahun	100.000.000	
V.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN										
13.	Penyusunan Profil Kependudukan										
13.1	Penyediaan data kependudukan Kabupaten/kota	Kota Bogor	Tersusunnya buku profil kependudukan	75 buku	33.600.000	Penyediaan data kependudukan Kabupaten/kota	Kota Bogor	Tersusunnya buku profil kependudukan	75 buku	100.000.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISDUKCAPIL

Untuk mewujudkan misi Pemerintah Kota Bogor, khususnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pada misi ke-3, yaitu “ ***Mewujudkan Kota Bogor Sebagai Kota Yang Sejahtera*** ”, dengan program yang akan ditempuh khususnya terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil, agar program kebijakan dapat berjalan dengan baik, salah satu strategi yang tepat untuk digunakan dalam mencapai keberhasilan kebijakan adalah dengan sistem perencanaan yang komperhensif, realistis, akuntabel, dan transparan. Akan tetapi sistem perencanaan yang sudah baik tanpa diimplementasikan dengan cermat juga akan menjadi penghambat pelaksanaan program kegiatan. Untuk itu perencanaan yang baik perlu juga didukung dengan implementasi kebijakan selaras dengan perencanaan, karena sebuah kebijakan merupakan siklus yang saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya maka perencanaan yang sudah baik didukung dengan implementasi yang cermat dan tepat maka selanjutnya diperlukan monitoring dan evaluasi untuk menentukan indikator keberhasilan program kebijakan melalui monitoring dan evaluasi akan diketahui tingkat keberhasilan dan hambatan dalam program kebijakan.

Sebagaimana di ketahui bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk bagi setiap pelaksana kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan masyarakat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategi berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program dan kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dapat disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2022

KODE					URAIAN	JUMLAH
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20.255.404.706
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.215.122.706
2	12	01	2,01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.423.400
2	12	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.423.400
2	12	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.365.772.234
2	12	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.365.772.234
2	12	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.629.249.800
2	12	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.135.100
2	12	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.596.600
2	12	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	620.872.700
2	12	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	244.950.000
2	12	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	123.855.000
2	12	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.840.400
2	12	01	2,07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.777.475.224
2	12	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.777.475.224
2	12	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.281.043.848
2	12	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	513.360.000
2	12	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.767.683.848
2	12	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.050.158.200
2	12	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.137.400
2	12	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	651.474.000
2	12	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	284.546.800
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	987.983.600
2	12	02	2,01		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	137.131.600
2	12	02	2.01	01	Pendataan Pendudukm Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	66.150.000

2	12	02	2,01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	43.781.600
2	12	02	2,01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	27.200.000
2	12	02	2,02		Penataan Pendaftaran Penduduk	850.852.000
2	12	02	2,02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	850.852.000
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	375.953.600
2	12	03	2,01		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	375.953.600
2	12	03	2,01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	47.661.600
2	12	03	2,01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	97.890.000
2	12	03	2,01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EL, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	230.402.000
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	311,657,000
2	12	04	2,01		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaata dan Penyajian Database Kependudukan	311,657,000
2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	21.880.000
2	12	04	2,01	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.864.800
2	12	04	2,01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	345.000.000
2	12	04	2,01	04	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	175.000.000
2	12	04	2,02		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	33.600.000
2	12	04	2,02		Penyusunan Profil Kependudukan	33.600.000
2	12	04	2,01	03	Penyediaan data kependudukan Kabupaten/kota	33.600.000

BAB V

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, maka dengan ini kita ketahui bersama bahwa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan dokumen yang sangat penting karena digunakan dalam kepengurusan dokumen dokumen penting seperti : Paspor, Sertifikat Tanah, SIM, persyaratan untuk masuk sekolah, melanjutkan Perguruan Tinggi dan lain – lain.

Data kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan Kota merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan (alokasi anggaran termasuk penghitungan DAU, pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal, untuk itu sangat perlu adanya penyajian data online agar data kependudukan selalu *up to date*, sehingga setiap elemen yang membutuhkan data kependudukan dapat secepatnya mendapat data yang valid.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan adanya Rencana Kerja ini di harapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor serta seluruh aparaturnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk selalu melaksanakan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan.

Walikota Bogor,

BIMA ARYA